



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FAJAR LAKSONO
2. Jabatan : KEPALA BIRO
3. NHK : 153182

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.700.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/160 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.150.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 122 m2/54 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 356.300.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 1.800.000
2. LAINNYA, PACIFIC SEPEDA Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 900.000
3. LAINNYA, FEDERAL SEPEDA Tahun 1990, HASIL SENDIRI Rp. 2.300.000
4. MOTOR, YAMAHA RX KING Tahun 1995, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
5. LAINNYA, PACIFIC SEPEDA Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 900.000
6. LAINNYA, PACIFIC SEPEDA Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 900.000
7. MOBIL, MITSUBISHI EXPANDER CROSS ROCKFORFOSGATE Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000
8. MOTOR, KAWASAKI NINJA 250 FI 2018 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 49.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 24.750.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	677.126.985
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.758.176.985
III. HUTANG	Rp.	410.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.348.176.985

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.